MITIGASI BENCANA TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PASCA BENCANA TSUNAMI ACEH

Evi Mauliza^{1*}, Halimatun Sakdiah²

^{1,2}Prodi Pendidikan Geografi, Universitas Al Washliyah (UNADA) Banda Aceh, Banda Aceh, Indonesia

*Email Koresponden: evimauliza@unada.ac.id

Diterima: 01-08-2025, Revisi: 05-09-2025, Disetujui: 10-09-2025

©2025 Universitas Hamzanwadi

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah luar biasa (SLB) pasca tsunami Aceh. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat dua pertanyaan yang dijawab dalam artikel ini: 1) evaluasi mitigasi bencana aktif di 13 sekolah luar biasa (SLB) di Kota Banda Aceh dan, 2) mitigasi bencana pasif yang di laksanakan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Tulisan ini didasarkan pada penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan dan instrumen penelitian menggunakan angket dan wawancara dengan indikator mitigasi bencana aktif dan pasif berdasarkan pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana dari peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala SLB yang berjumlah berjumlah 13 Orang dan Pejabat BPBA bidang pencegahan dan kesiapsiagaan 1 Orang. Teknik analisis data angket menggunakan presentase sederhana dan data wawancara menggunakan teknik data kualitatif dari Milles & Huberman. Hasil penelitian mitigasi bencana aktif menunjukkan 11 sekolah di 5 yayasan yang menaungi SLB di Kota Banda Aceh masuk dalam kategori cukup (40%-55%) dalam mitigasi bencana pasif, 2 sekolah di antaranya masuk dalam kategori Baik (56%-75%). Untuk evaluasi bencana pasif menunjukkan dalam penanganan mitigasi bencana pasif bagi anak berkebutuhan khusus masih terfokus pada kalangan masyarakat umum.

Kata kunci: Mitigasi, Gempa dan Tsunami, Anak Berkebutuhan Khusus, Sekolah Luar Biasa

Abstract. This research aims to broadcast earthquake and tsunami disaster mitigation for Children with Special Needs (ABK) in special schools (SLB) after the Aceh tsunami. In line with this, there are two questions answered in this article: 1) evaluation of active disaster mitigation in 13 special schools (SLB) in Banda Aceh City and, 2) passive disaster mitigation implemented by the Aceh Disaster Management Agency (BPBA). This paper is based on qualitative descriptive research with collection techniques and research instruments using questionnaires and interviews with active and passive disaster mitigation indicators based on guidelines for preparing disaster management plans from the regulation of the Head of the National Disaster Management Agency Number 4 of 2008. The informant in this research is the Head of the SLB who the number is 13 people and 1 BPBA official in the field of prevention and preparedness. The questionnaire data analysis technique uses simple percentages and interview data uses qualitative data techniques from Miles and Huberman. The results of active disaster mitigation research show that 11 schools in 5 foundations that oversee SLBs in Banda Aceh City are in the adequate category (40%-55%) in passive disaster mitigation, 2 of which are in the Good category (56%-75%). The evaluation of passive disasters shows that handling passive disaster mitigation for children with special needs is still focused on the general public.

Keywords: Mitigation, Earthquakes and Tsunami, Children with Special Needs, Special Schools

PENDAHULUAN

Mitigasi bencana terhadap anak berkebutuhan khusus pasca tsunami Aceh sangat penting. Hal Ini dibuktikan dengan data hasil tahun 2019 dengan mengukur tingkat kesiapsiagaan komunitas sekolah dalam membantu anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menghadapi bencana gempa dan tsunami di Sekolah Luar Biasa (SLB) seluruh Kota Banda Aceh menggunakan 5 indikator kesiapsiagaan dari UNESCO/ISDR tahun 2006 menghasilkan data bahwa 76,92% dari 13 Sekolah Luar Biasa di lima yayasan yang menaungi anak berkebutuhan khusus dengan indeks kesiapsiagaan (40-45) berada pada kategori kurang siap menghadapi bencana, sedangkan 23,08% berada pada indeks kesiapsiagaan 55-64

berada pada kategori hampir siap menghadapi bencana (Mauliza, 2021). Menurut Hayudityas (2020) kegiatan mitigasi bertujuan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dan pengurangan risiko bencana untuk jangka waktu yang panjang, mengurangi jumlah korban, dan diterapkan semaksimal mungkin untuk meminimalisir dampak bencana.

Studi tentang evaluasi mitigasi bencana bagi ABK merupakan hal yang penting. Mitigasi bencana selama ini masih bersifat umum bagi masyarakat sehingga anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa belum memiliki kebijakan yang mengatur mitigasi bencana bagi kalangan disabilitas tersebut. Studi selanjutnya menyatakan upaya mengurangi risiko bencana gempa sangat diperlukan terutama bagi anak berkebutuhan khusus (Lufti, 2019; Suharwoto, 2015). Anak berkebutuhan khusus merupakan bagian dari masyarakat yang beresiko paling rentan, tetapi cenderung terpinggirkan dan terlupakan dalam kondisi bencana. Dalam kedudukan hak asasi manusia, mereka mempunyai hak yang sama untuk mengetahui cara melindungi dan menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Hal ini turut diperkuat oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa 15% populasi dunia merupakan penyandang disabilitas dan prevalensinya bahkan lebih tinggi lagi di negara-negara pasca konflik. Kolom ketiga menunjukkan 15% dari setiap populasi negara (agenda, 2018). Untuk jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan berdasarkan data Susenas 2022, jumlah penduduk Indonesia mencapai 273,8 juta jiwa. Dapat diperkirakan 8,5% jumlah disabilitas di Indonesia 22,5 Juta jiwa dari penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas di Indonesia (BPS, 2022).

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan bagian dari disabilitas yang beresiko paling rentan, tetapi cenderung terpinggirkan dan terlupakan dalam kondisi bencana (Isti, 2018). Surat edaran Mendiknas No 70a/MPN/SE/2010 keberadaan kelompok rentan di sekolah. Kelompok rentan yang dimaksud adalah ibu hamil, orang lanjut usia serta anak berkebutuhan khusus. Keberadaan anak berkebutuhan khusus banyak ditemukan di sekolah khusus dan sekolah inklusi. Seiring penerapan kebijakan pendidikan inklusi yang di atur dalam Permendiknas no 70 tahun 2009 maka jumlah sekolah inklusi yang melayani berbagai anak berkebutuhan khusus terus bertambah dari tahun ke tahun (BNPB, 2007). Anak kebutuhan khusus wajib mendapatkan perlindungan yang layak. Di mata hak asasi manusia mereka memiliki kedudukan yang sama. Mereka memiliki perbedaan kemampuan penyelamatan diri dari orang biasa pada umumnya (Probosiwi, 2013). Hak mereka dilindungi dari bencana juga turut diperkuat oleh Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana. ABK mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya untuk mengetahui tentang cara melindungi dan menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Maka diperlukan adanya informasi bagaimana prosedur atau rencana penyelamatan bagi ABK terhadap bencana (Komalasari, 2019). Studi terdahulu tentang mitigasi bencana di Indonesia yang dilakukan cenderung fokus pada kelompok sosial umum di Indonesia (Hidayat, 2020). Pendidikan kebencanaan bagi siswa berkebutuhan khusus menjadi hal yang sangat penting dan serius untuk dilaksanakan (Taklal, 2023). Anak berkebutuhan khusus mengalami gangguan fisik, mental, inteligensi, dan emosi sehingga membutuhkan pembelajaran secara khusus (Utina, 2014). Untuk itu penelitian ini menjadi penting dalam meneliti mitigasi bencana terkait anak berkebutuhan khusus sebagai kalangan yang terlupakan dalam bencana.

Dalam rencananya, penelitian evaluasi mitigasi bencana gempa dan tsunami ini berupaya menilai kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam upaya melakukan dan membuat kebijakan mitigasi bencana terhadap ABK di SLB seluruh Kota Banda Aceh. Dengan harapan data hasil penelitian tingkat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana ini dapat menjadi dasar berpijak yang digunakan oleh pemangku kebijakan dalam menindaklanjuti kebijakan yang ada berkaitan dengan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana khusus pada SLB di Aceh. Hal ini sesuai amanat UndangUndang No. 24 Tahun 2007 untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di sekolah. Hal ini dilatarbelakangi oleh program yang ada tidak mencakup masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan psikis sehingga tingkat keberhasilan programnya pun terbatas.

Evaluasi terhadap mitigasi bencana ini sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana penerapan mitigasi aktif di SLB dan kebijakan mengenai mitigasi pasif yang di buat oleh BPBA pasca tsunami Aceh. Menurut Kumalasari et al. (2023) mitigasi bencana aktif merupakan upaya pengurangan dampak dan risiko bencana melalui kegiatan yang memerlukan kontrak langsung dengan masyarakat sebagai aktor utama, sedangkan mitigasi pasif adalah upaya pengurangan risiko dan dampak bencana melalui tindakan. Dalam mitigasi pasif ini aktor yang paling berperan adalah pemerintah dalam hal ini BPBA Provinsi Aceh. Selanjutnya penelitian ini juga sangat penting agar menghasilkan data sebagai standar ukur mitigasi ABK dari bencana gempa dan tsunami di SLB. Sebagaimana yang pernah diteliti oleh Alias et al. (2020), Haryani (2012) bahwa pentingnya mengetahui model mitigasi bencana aktif dan pasif yang cocok untuk anak berkebutuhan khusus dan kendala yang dialami selama ini dalam pelaksanaan mitigasi. Dengan harapan data tersebut dapat digunakan oleh pemangku kebijakan dalam menindaklanjuti kebijakan yang ada berkaitan mitigasi bencana khusus pada SLB di kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh pada umumnya.

Tujuan tulisan ini untuk mengevaluasi mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah luar biasa seluruh Kota Banda Aceh. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat dua pertanyaan yang dijawab dalam artikel: 1) Mitigasi bencana Aktif di 13 sekolah Luar Biasa di Kota Banda Aceh, 2) mitigasi bencana Pasif yang di laksanakan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang mampu mengakomodir kepentingan anak berkebutuhan khusus.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini didasarkan pada penelitian kualitatif yang diukur menggunakan angket dengan skala Likert dan wawancara terstruktur. Instrumen penelitian menggunakan indikator mitigasi bencana aktif dan pasif berdasarkan pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana dari peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah Luar Baisa yang berjumlah berjumlah 13 Orang dan Pejabat Badan Penangulangan Bencana Aceh (BPBA) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1 Orang. Alasan pemilihan informan didasarkan pada wewenang kepala sekolah selaku pimpinan pada sekolah luar biasa dalam menjalankan mitigasi bencana aktif. Informan selanjutnya adalah BPBA sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam menyusun dan menjalankan mitigasi Pasif dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh bagi anak berkebutuhan khusus.

Dalam penelitian evaluasi mitigasi bencana bagi anak berkebutuhan khusus pasca tsunami aceh berlokasi pada 13 sekolah luar biasa di Kota Banda Aceh dan kantor BPBA. Pemilihan lokasi penelitian pada SLB di Kota Banda Aceh dengan alasan beberapa alasan: 1) Banda Aceh merupakan daerah kategori rawan gempa dan tsunami, 2) Kota Banda Aceh memiliki banyak yayasan yang menaungi sekolah luar biasa bagi anak berkebutuhan khusus, dan 3) memiliki tujuan untuk menghindari dan menyelamatkan ABK saat terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana di Kota Banda Aceh. Berikut adalah lokasi penelitian evaluasi mitigasi bencana bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa Kota Banda Aceh:

Tabel 1. Daftar Alamat Yayasan Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus di Banda Aceh

No	Nama Yayasan	Alamat
1	Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) SMALB-CD* SMALB-B* SMPLB-CD* SMPLB-B* SDLB-CD* SDLB-B*	Jl. Banda Aceh - Medan Gampong Santan Kecamatan Ingin Jaya Kota Banda Aceh
2	Yayasan Bina Upaya Kesejahteraan Para Cacat (Bukesra) SMALB SMPLB SDLB-AB*	Jl. Kebun Raja Gampong Doi Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
3	Yayasan Rumah Kita The Nanny Children Center (TTNC)	Jl. Rajawali No. 5 Gampong Keramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

4	SDLB Yayasan Bunda Saifullah Meutuah (YBSM) SDLB	Jl. Pendidikan No. 2 Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
5	Yayasan Penyantun Penyandang Cacat (YPPC) SMPLB SMALB	Gampong Labui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Ket: A: Tuna rungu B: Tuna rungu Tuna wicara CD :Tuna grahita dan Tuna daksa F: Tuna Wicara Q:Autis P:Down Syndrom

Sumber: DAPODIK <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id>, (2023)

Pengumpulan data dalam penelitian evaluasi mitigasi bencana bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa pasca tsunami Aceh menggunakan 2 instrumen penelitian, yaitu angket dan wawancara. Angket yang digunakan untuk mengukur evaluasi mitigasi bencana aktif dengan 7 indikator berdasarkan pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana dari peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008. Angket tersebut menggunakan skala likert positif dalam 4 Kategori 1 (Kurang Baik) 2 (Cukup), 3 (Baik), 4 (sangat Baik). Indikator yang digunakan dalam Angket untuk mengukur mitigasi bencana aktif dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Mitigasi Bencana Aktif

No	Indikator Mitigasi Bencana Aktif
1	Indikator 1: Pembuatan dan penempatan tanda-tanda bencana di Sekolah Luar Biasa (SLB)
2	Indikator 2: Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan (IMB) gedung sekolah dan fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pencegahan bencana.
3	Indikator 3: Pelatihan dasar kebencanaan bagi komunitas Sekolah Luar Biasa (SLB)
4	Indikator 4: Mobilisasi komunitas Sekolah Luar Biasa (SLB) dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.
5	Indikator 5: Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan bencana komunitas Sekolah Luar Biasa (SLB)
6	Indikator 6: Perencanaan titik penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi bencana di Sekolah Luar Biasa (SLB)
7	Indikator 7: Pembuatan bangunan struktur dan fasilitas sekolah luar biasa (SLB) aman bencana Sekolah Luar Biasa

Sumber: Pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana dari peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008.

Wawancara untuk mengukur evaluasi mitigasi bencana pasif menggunakan dengan 10 indikator berdasarkan pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana dari peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008. Wawancara bersifat terstruktur dengan menggunakan pedoman atau daftar wawancara. Daftar wawancara yang di gunakan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Mitigasi Bencana Pasif

No	Indikator Mitigasi Bencana Pasif
1	Indikator 1: Penyusunan peraturan perundang-undangan bencana bagi anak berkebutuhan khusus
2	Indikator 2: Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB)
3	Indikator 3: Pembuatan pedoman/standar/prosedur bencana bagi anak berkebutuhan khusus
4	Indikator 4: Pembuatan media sosialisasi seperti brosur/leaflet/poster ramah bagi anak berkebutuhan khusus
5	Indikator 5: Penelitian / pengkajian karakteristik bencana bagi anak berkebutuhan khusus
6	Indikator 6: Pengkajian / analisis risiko bencana bagi anak berkebutuhan khusus
7	Indikator 7: Internalisasi Penagaan Bencana dalam muatan lokal pendidikan Bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa (SLB)
8	Indikator 8: Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana di sekolah luar biasa (SLB)
9	Indikator 9: Perkuatan komunitas sekolah terhadap bencana seperti forum
10	Indikator 10: Pengarus-utamaan Penanganan Bencana dalam perencanaan pembangunan di sekolah luar biasa (SLB)

Sumber: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008.

Analisis data angket menggunakan teknik presentase sederhana. Menurut Sugiyono (2009) teknik presentase menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = besaran persentase

F = frekuensi jawaban

N = jumlah total responden

Hasil perolehan akhir data presentase angket mitigasi bencana aktif terhadap anak berkebutuhan khusus dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. Interval Perolehan Nilai

No	Interval Perolehan Nilai	Kategori
1.	<40%	Kurang Baik
2.	40% hingga 55%	Cukup
3.	56% hingga 75%	Baik
4.	76% hingga 100%	Sangat Baik

Sumber: Arikunto, 2006

Analisis data kualitatif wawancara menggunakan teknik pengolahan data kualitatif dari Milles & Huberman. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu: 1) Pengumpulan Data Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. 2) Reduksi Data Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. 3) Penyajian Data Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. 4) Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Mitigasi Bencana Aktif

Hasil penelitian evaluasi mitigasi aktif bencana gempa dan tsunami terhadap anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Kota Banda Aceh menggunakan indikator pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana dari peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 sebagai berikut:

Tabel 5. Data Hasil Penelitian Evaluasi Mitigasi Bencana Aktif Gempa dan Tsunami Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Kota Banda Aceh

No	Yayasan	Responden (Kepala Sekolah Luar Biasa)	Total Skor	% Skor	Kategori
1	SLB Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC)	SMALB-CD*	15	53,6%	Cukup
2		SMALB-B*	12	42,89%	Cukup
3		SMPLB-CD*	15	53,6%	Cukup
4		SMPLB-B*	12	42,89%	Cukup
5		SDLB-CD*	20	71,4%	Baik
6		SDLB-B*	13	46,4%	Cukup
7	SLB Yayasan Bina Upaya Kesejahteraan Para Cacat (Bukesra)	SMALB	14	50%	Cukup
8		SMPLB	15	53,6%	Cukup
9		SDLB-AB*	21	75%	Baik
10	SLB Yayasan The Nanny Children Center (TNCC)	SDLB	12	42,89%	Cukup
11	SLB Yayasan Bunda Saifullah Meutuah (YBSM)	SDLB	12	42,89%	Cukup

12	SLB Yayasan	Penyantun	SMALB	19	67,9%	Baik
13	Penyandang cacat (YPPC)		SMPLB	15	53,6 %	Cukup

Ket: A: Tuna rungu B: Tuna rungu dan Tuna nicara CD :Tuna grabita dan Tuna daksa

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan data pada tabel 5 di atas, hasil penelitian evaluasi mitigasi bencana aktif di sekolah luar biasa dengan 7 pertanyaan menunjukkan 13 responden yang terdiri dari kepala sekolah di SLB kota Banda Aceh masih cukup baik. Hasil penelitian teknik angket untuk mitigasi bencana aktif menunjukkan 11 sekolah di 5 yayasan yang menaungi SLB di Kota Banda Aceh masuk dalam kategori cukup (40%-55%) dalam mitigasi bencana pasif, 2 sekolah di antaranya masuk dalam kategori Baik (56%-75%).

Berikut grafik evaluasi mitigasi bencana aktif di sekolah luar biasa menunjukkan 13 responden yang terdiri dari kepala sekolah di SLB kota Banda Aceh adalah:

Gambar 1. Persentase evaluasi mitigasi bencana aktif (2023)
(Sumber: Olahan Peneliti, 2023)

Data penelitian terkait grafik di atas dapat dilihat beberapa faktor yang mempengaruhi mitigasi bencana aktif di sekolah luar biasa menunjukkan 13 responden yang terdiri dari kepala sekolah di SLB kota Banda Aceh adalah Satu, Rata-rata SLB memberikan jawaban point 1 (kurang) terkait pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana di sekolah luar biasa (SLB). SLB masih belum seluruhnya dari 13 SLB memiliki penempatan tanda-tanda peringatan bahaya gempa dan tsunami di gedung sekolah yang ramah anak berkebutuhan khusus terhadap berbagai ketunaan, baik Tuna rungu Tuna wicara, Tuna grahita dan Tuna daksa. Beberapa Sekolah sudah memiliki tanda peringatan bencana tetapi berupa evakuasi route yang biasa di gunakan kepada masyarakat umum. Kedua, Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan (IMB) sekolah luar biasa (SLB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana di sekolah. Data Hasil Penelitian menemukan fakta, pimpinan sekolah tidak bahkan jarang dilibatkan yayasan dalam pembangunan gedung dan fasilitas sekolah. Yayasan memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan fasilitas sekolah. Untuk itu, hasil penelitian menunjukkan fasilitas SLB cenderung kurang memperhatikan peraturan pembangunan sarana sekolah yang aman bencana pasca tsunami Aceh. Tiga, Pelatihan dasar kebencanaan bagi komunitas Sekolah Luar Biasa (SLB). Data Hasil Penelitian menunjukkan bahwa komunitas sekolah melalui perwakilan guru telah mendapatkan pelatihan dasar kebencanaan baik yang dilakukan oleh *volunteer* langsung di sekolah atau perwakilan guru yang di undang oleh BPBA untuk dilatih secara langsung, tetapi tidak semua SLB mendapatkan pelatihan serupa dari lembaga maupun *volunteer*.

Mitigasi Bencana Pasif

Hasil penelitian evaluasi mitigasi pasif bencana gempa dan tsunami terhadap anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Kota Banda Aceh menggunakan indikator pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana dari peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 dengan instrumen wawancara. Data di temukan dengan melakukan wawancara dengan Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Kepala Seksi Pencegahan Bapak Yudhie Satria, SST, MPSSP sebagai berikut:

Tabel 6. Data Hasil Penelitian Evaluasi Mitigasi Bencana Pasif Gempa dan Tsunami Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Kota Banda Aceh

No	Indikator Mitigasi Bencana Pasif	Hasil Penelitian
1	Indikator 1: Penyusunan peraturan perundang-undangan bencana bagi anak berkebutuhan khusus	Dalam menjalankan mitigasi bencana di Aceh terutama satuan pendidikan, Badan penanggulangan bencana Aceh (BPBA) menjalankan amanat undang-undang, peraturan pemerintah Pusat, Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan pemerintah Provinsi Aceh sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana 4. Peraturan Kepala Bnpb No 04 Tahun 2012 Tentang: Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana 5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana 6. Rancangan Qanun Dan Naskah Akademik Tahun 2019 Tentang Pendidikan Kebencanaan Aceh BPBA berperan aktif dalam membantu pemerintah Aceh menyusun peraturan daerah (Qanun) terkait bencana dan pendidikan bencana di Aceh. Saat ini pemerintah Aceh sedang berupaya menyusun Rancangan qanun dan naskah akademik tahun 2019 tentang pendidikan kebencanaan aceh. Untuk peraturan khusus terkait mitigasi bencana anak berkebutuhan khusus masih belum ada, karena qanun atau peraturan BPBA masih bersifat umum untuk seluruh satuan pendidikan.
2	Indikator 2: Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah bagi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB)	Untuk Rambu bencana terutama peta Bencana yang di buat oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) saat ini masih bersifat umum untuk kalangan masyarakat. Peta rawan bencana dapat di akses siapa saja pada link resmi https://uptbgis.bandaacehkota.go.id. Selanjutnya ada juga peta bencana yang terpasang di ruang-ruang publik maupun infografis lainnya
3	Indikator 3 Pembuatan pedoman/standar/prosedur bencana bagi anak berkebutuhan khusus	Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) saat ini tidak membuat Pedoman dan SOP bencana tetapi mengikuti dan mengimplementasikan pedoman/standar/prosedur merujuk pada petunjuk teknis penerapan sekolah madrasah aman bencana (SMAB) bagi anak berkebutuhan khusus (satuan pendidikan khusus & reguler) tahun 2016 oleh secretariat sekolah aman berada di bawah direktorat pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK) yang diadopsi dari petunjuk teknis sekolah aman bencana BNPB.
4	Indikator 4 Pembuatan media sosialisasi seperti brosur/leaflet/poster ramah bagi anak berkebutuhan khusus	Pembuatan media sosialisasi seperti brosur/leaflet/poster ramah bagi anak berkebutuhan khusus di Aceh masih belum ada, media sosialisasi selama ini yang di buat BPBA masih bersifat umum untuk kalangan masyarakat. Kedepan BPBA akan penyusunan modul dan buku edukasi kesiapsiagaan bencana yang disesuaikan dengan hambatan yang dialami siswa serta jenis bencana yang paling berpotensi muncul di wilayah sekolah, simulasi dengan metode role playing atau bermain peran yang difokuskan untuk menunjukkan peristiwa yang kemungkinan terjadi, permainan, dan literasi media dan interpretasi bencana dengan tujuan memaknai suatu hal dengan kritis.
5	Indikator 5 Penelitian / pengkajian karakteristik bencana bagi anak berkebutuhan khusus	Penelitian / pengkajian karakteristik bencana bagi anak berkebutuhan khusus juga masih belum dilakukan oleh BPBA yang masih terfokus pada kajian penelitian bencana masyarakat umum. Namun selama ini untuk pengkajian karakteristik dan resiko bencana dilakukan oleh mitra kalangan akademisi dan praktisi bekerjasama dengan BPBA. BPBA mensupport melalui data- data dukungan kepentingan

		penelitian tersebut.
6	Indikator 6 Pengkajian / analisis risiko bencana bagi anak berkebutuhan khusus	Untuk Pengkajian/ analisis risiko bencana bagi anak berkebutuhan khusus juga sama seperti Penelitian / pengkajian karakteristik bencana bagi anak berkebutuhan khusus juga masih belum dilakukan oleh BPBA yang masih terfokus pada kajian penelitian bencana masyarakat umum. Untuk analisis Resiko bencana masih dalam kalangan Pendidikan umum di lingkungan pendidikan Aceh. Dalam kajian resiko bencana selama ini terus dilakukan guna menjadikan Aceh Aman bencana.
7	Indikator 7 Internalisasi Penagaan Bencana dalam muatan lokal pendidikan Bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa (SLB)	Struktur dan muatan kurikulum di SLB memuat pengetahuan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di sekolah melalui mata pelajaran khusus yang diterapkan sekolah. Selanjutnya pendidikan bencana di sekolah provinsi Aceh juga di dukung dengan lahirnya Rancangan Qanun Dan Naskah Akademik Tahun 2019 Tentang Pendidikan Kebencanaan Aceh. Walaupun masih berupa qanun yang belum di uji materi, qanun ini mendukung satuan pendidikan untuk sigap bencana, Di antara pasalnya berbunyi Fungsi pendidikan kebencanaan adalah untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang tanggap dan siaga terhadap bencana. Sedangkan tujuan pendidikan kebencanaan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia yang: (a) beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwa ta'ala; (b) berakhlak mulia; (c) memiliki pengetahuan kebencanaan; (d) memiliki sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana; (e) tanggap dan siaga bencana; dan (f) memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besardan mendadak. Prinsip penyelenggaraan pendidikan kebencanaan adalah: (a) pendidikan kebencanaan untuk semua peserta didik tanpa membedakan suku, agama, ras, dan keturunan; (b) pendidikan kebencanaan diselenggarakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (c) penyelenggaraan pendidikan kebencanaan dilakukan secara terarah; terencana, terprogram, terpadu, terkoordinasi, profesional, dan menyeluruh; dan (d) pendidikan kebencanaan didasarkan pada nilai-nilai islami dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, adat istiadat, dan kearifan lokal.
8	Indikator 8 Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana di sekolah luar biasa (SLB)	Tim Siaga Bencana Sekolah adalah perwakilan warga sekolah yang telah mendapatkan pelatihan terkait pengurangan risiko bencana. Dalam setiap pelatihan yang di buat oleh BPBA membantu sekolah dalam menginisiasi terbentuknya gugus bencana di sekolah sebagai garda depan saat bencana terjadi melalui SK kepala sekolah. Selanjutnya realisasi di SLB dikembalikan kepada hak priogatif SLB masing-masing.
9	Indikator 9 Perkuatan komunitas sekolah terhadap bencana seperti forum	Perkuatan komunitas sekolah di Aceh, termasuk SLB melalui terlaksananya sosialisasi, Forum , FGD mengenai pengetahuan PRB, SSB dan kesiapsiagaan kepada komunitas sekolah dan pemangku kepentingan sekolah setiap 1 tahun sekali.
10	Indikator 10 Pengarus-utamaan Penangana Bencana dalam perencanaan pembangunan di sekolah luar biasa (SLB)	Terkait sarana prasarana dan fasilitas sekolah aman bencana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 04 Tahun 2012 Tanggal: 30 April 2012 Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Dari Bencana. Seluruh sekolah termasuk SLB wajib mengikuti peraturan tersebut dalam standa perencanaan pembangunan. Namun perencanaan pembangunan sekolah kembali kepada yayasan sebagai pengelola SLB yang ada. BPBA terus berupaya mensosialisasikan pengarusutamakan bencana dalam lingkungan seklah terutama sekolah luar biasa.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan data pada tabel 6 di atas, hasil penelitian evaluasi mitigasi bencana pasif di sekolah luar biasa dengan menggunakan dengan 10 indikator berdasarkan pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana dari peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 menunjukkan, bawa dalam penanganan mitigasi bencana pasif bagi anak berkebutuhan khusus masih terfokus pada kalangan masyarakat umum. BPBA sudah melaksanakan berbagai upaya maksimal dalam penanganan mitigasi bencana, butuh usaha maksimal dalam merealisasikan mitigasi bencana aktif berjalan baik di kalangan sekolah luar biasa di Aceh bersama kalangan mitra, akademisi dan praktisi. Menurut Rofiah, 2021 ada enam elemen kunci pendidikan mitigasi bencana inklusif di sekolah luar biasa (SLB): (1) inisiatif yang kuat untuk melakukan edukasi pengurangan risiko bencana (PRB) secara mandiri kepada seluruh siswa; (2) modifikasi infrastruktur dan lingkungan pembelajaran untuk menampung anak berkebutuhan khusus dan siswa lainnya; (3) memperluas metode pembelajaran PRB; (4) pemberdayaan anak dan partisipasi bermakna; (5) kesadaran manajemen sekolah dan strategi

pelaksanaan PRB; (6) keterlibatan pemangku kepentingan yang luas dalam pendidikan mitigasi bencana (Rofiah, 2021). BPBA terus melakukan perbaikan guna menjadikan Aceh aman dari resiko bencana khusus bagi satuan pendidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi mitigasi bencana gempa dan tsunami bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa kota banda Aceh masih dalam kategori Cukup. Hasil penelitian teknik angket menunjukkan 11 sekolah di 5 yayasan yang menaungi SLB di Kota Banda Aceh masuk dalam kategori cukup (40%-55%) dalam mitigasi bencana pasif, 2 sekolah di antaranya masuk dalam kategori Baik (56%-75%). Untuk Hasil penelitian Teknik wawancara memperoleh hasil penelitian evaluasi mitigasi bencana pasif di sekolah luar biasa dengan menggunakan dengan 10 indikator berdasarkan pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana dari peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 menunjukkan, bawa dalam penanganan mitigasi bencana pasif bagi anak berkebutuhan khusus masih terfokus pada kalangan masyarakat umum. BPBA sudah melaksanakan berbagai upaya maksimal dalam penanganan mitigasi bencana, butuh usaha maksimal dalam merealisasikan mitigasi bencana aktif berjalan baik di kalangan sekolah luar biasa di Aceh bersama kalangan mitra, akademisi dan praktisi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kemendikti Saintek Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi atas dana hibah penelitian serta segenap Civitas Akademika Universitas Al Washliyah Darussalam (UNADA) Banda Aceh dukungan terhadap jurnal yang berjudul Mitigasi Bencana Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Pasca Tsunami Aceh kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agenda. (2011). Disabilitas di Negara-negara Asia Tenggara. <http://www2.agendaasia.org/index.php/id/informasi/disabilitas-di-negara-negara-asean/103-disabilitas-di-negara-negara-asia-tenggara>. (Diakses, 29 Agustus 2018).
- Alias, M., & Yunus, M. (2020). Analisis Kebijakan Mitigasi Bencana Daerah Zona Sesar Sadding. *Jurnal Spasial*, 7(3):118–26. <https://doi.org/10.22202/js.v7i3.439>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- BNPB. (2008). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008.
- BNPB. (2018) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. 2007. https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf. (diakses: 15 Agustus 2018).
- BPS. (2018). Data Jumlah Difabel di Indonesia. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>. (diakses, 15 Agustus 2018).
- Data pokok pendidikan. <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id>. (diakses: 22 Agustus 2018).
- Haryani. (2016). Model Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir Dengan Pemberdayaan Masyarakat. *Tataloka*, 14(3), 201-212.
- Hayudityas, B. (2020). Pentingnya Penerapan Pendidikan Mitigasi Bencana di Sekolah untuk Mengetahui Kesiapsiagaan Peserta Didik. *Jurnal Edukasia Nonformal*, 1(2).
- Hidayat, L. (2020). Pengembangan Buku Kesiapsiagaan Bencana untuk Sekolah Inklusi (HASIL Analisis Sekolah Ramah Anak di Sleman Yogyakarta). *Elementary School*, 7(1), 58–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/esjurnal.v7i1.480>

- Isti R. (2018) Anak Berkebutuhan Khusus Beresiko Menjadi Korban Bencana Alam Lebih Tinggi. <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/04/29/anak-berkebutuhan-khusus-resiko-menjadi-korban-bencana-alam-lebih-tinggi>. (diakses: 15 Agustus 2018).
- Komalasari, M., & Pamungkas, B. (2019). Model Mitigasi Bencana Berbasis Multisensoris untuk Anak Berkebutuhan Khusus di SD Inklusi Kota Yogyakarta. *Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.15294/panjar.v1i1.28460>
- Kumalasari, K., (2023). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bencana Banjir melalui Penyuluhan Mitigasi Bencana di Kelurahan Sawojajar Kota Malang. *JPKEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat STIA MALANG*, 1(2), 45–51.
- Lutfi, L., Rahmadani., Zikri I., Suharman, H., Fitra, MI., Kurnia R. (2020). *Mitigasi bencana Gempa Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan Metode Fun Therapy*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mauliza, E., & Sakdiyah, H. (2021). Tingkat Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah dalam Membantu Anak Berkebutuhan Khusus Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sekolah Luar Biasa, *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 6(3), 175-186.
- Probosiwi, R. (2013). Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 4(2), 5-12.
- Rofiah, N. H., Kawai, N., & Hayati, N. (2021). Key elements of disaster mitigation education in inclusive school setting in the Indonesian context. *JAMBA*, 13(1), 1159. <https://doi.org/10.4102/jamba.v13i1.1159>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharwoto, G. (2015). *Modul Pilar-Pilar Manajemen Bencana di Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta UNICEF.
- Taklal, S.A., Ikka, E.G., Ajeng, J., & Deliviana, E. (2023). Pendidikan kebencanaan bagi siswa berkebutuhan khusus. *ORIEN: Jurnal Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 1-6.
- Tim Penyusun. (2011). *Modul Penyelenggaraan Pelatihan Pengelola P2TP2A Dalam Penanggulangan Bencana Yang Responsif Gender*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Utina, S.S. (2014). Pendidikan anak berkebutuhan khusus. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 72-78.